



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No. 30 Telp. (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

Nomor : 130/DPMPTSP/XI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

YAYASAN HARAPAN BANGSA GAMPONG LANCONG

KECAMATAN SUNGAI MAS KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang

a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional.

b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat

Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;

Undang-undang Nomor: 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;

Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat;

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penanda Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan

Akte Notaris Pendirian Lembaga Nomor 19 Tahun 2014 Tanggal, 19 April 2014

Permohonan Ketua Lembaga Nomor 03/SP/KI/LC/2021 Tanggal, 23 Agustus 2021

Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No.421.9/545/2021 Tanggal, 28 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini YAYASAN HARAPAN BANGSA

Program :

“TAMAN KANAK-KANAK (TK) “ KASIH IBU ”

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 22 November 2021 s/d 20 November 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH  
PADA TANGGAL : 22 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

EDY JUANDA, M. Si

Pembina Utama Muda

Nip.19741209 199311 1 003

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektor Kabupaten Aceh Barat;
4. Sekretaris MPD di Meulaboh;
5. Camat Sungai Mas;
6. Kewehul Gampong Lancong;
7. Arsip.

